

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Akrual Atas Barang Milik Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Ruminingsih^{1*)}; Ikhsan Budi Riharjo²⁾; Lilis Ardini³⁾

^{1*)} bundarumi@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

²⁾ ikhsanbudiriharjo@stiesia.ac.id, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

³⁾ lilisardini@stiesia.ac.id, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

^{*)} Corresponding Author

Article Info:

Abstract

Keywords:

Human Resource Competence;
Organizational Commitment;
Information Technology Systems;
Stock Holding Intensity;
Effectiveness of Implementing Accrual Government Accounting

Article History:

Received : 2019-07-01
Revised : 2020-06-23
Accepted : 2020-08-03

Article Doi:

<http://dx.doi.org/10.22441/profita.2020.v13i2.003>

This study aims to investigate and analyze the effect of human resource competencies, organizational commitment, technology and information systems, and the intensity of stock-taking on the effectiveness of an application of accrual government accounting standards for the regional property. Therefore, a quantitative method was applied with a survey approach. This research was conducted in 72 (seventy-two) Regional Device Organizations (OPD) in Surabaya. This study used purposive sampling. The research respondents were Financial Administration Officers (PPK) and officers on goods users. As the result of statistical values, 26.9% of effective variables that applied accruals government accounting standards on the regional property could be explained with variables of human resource competence, organizational commitment, technology, and information systems, and the intensity of stock-taking. Moreover, this study indicated that human resource competence and organizational commitment had a positive effect on the application effectiveness of accrual government accounting standards for the regional property. Whereas, the technology and information systems and the intensity of stock-taking had no effect on the effectiveness of the application of accrual government accounting standards for the regional property. This study also suggested OPD within the Surabaya City Government to improve the effectiveness of the application of accrual government accounting standards for the regional property.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, teknologi dan sistem informasi, dan intensitas stock opname terhadap efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan pendekatan survei. Penelitian dilaksanakan pada 72 (tujuh puluh dua) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan (judgment sampling). Responden penelitian ini adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan/atau staf PPK dan Pengurus Barang Pengguna. Berdasarkan nilai statistika bahwa sebanyak 26,9% variabel efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah mampu dijelaskan oleh variabel kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, teknologi dan sistem informasi, dan intensitas stock opname. Hasil penelitian menunjukkan kompetensi sumber daya manusia dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah. Sedangkan teknologi dan sistem informasi serta intensitas stock opname tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerapan standar akuntansi

pemerintahan akrual atas barang milik daerah. Hasil penelitian ini memberikan masukan kepada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah.

Kata Kunci: Kompetensi; Komitmen; Teknologi Informasi; Intensitas Stock Opname; Standar Akuntansi Pemerintahan; Penerapan Sistem Akrual Atas Barang Milik Daerah

PENDAHULUAN

Penerbitan 3 (tiga) paket Undang-Undang keuangan negara di Indonesia menandai adanya reformasi pengelolaan keuangan sebagai tuntutan atas penerapan *New Public Management* (NPM). Tiga paket peraturan perundangan tersebut terdiri atas UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Mahmudi (2007) menyatakan bahwa konsep NPM terkait dengan manajemen kinerja sektor publik karena pengukuran kinerja menjadi salah satu prinsip NPM. Akuntansi juga memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan indikator kinerja sebagai dasar untuk mengukur kinerja (Wibowo, 2017). Hal ini mengarah pada reformasi terkait pengelolaan keuangan daerah.

Reformasi mendasar terhadap pengelolaan keuangan daerah dengan diterbitkannya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Wahyuni (2016) menegaskan bahwa salah satu ujung tombak pengelolaan keuangan daerah yang baik, dapat dipertanggungjawabkan dan transparan adalah melalui Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Mahmudi (2013) menegaskan bahwa standar akuntansi pemerintah merupakan salah satu aspek penting dalam peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintahan. Penerbitan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (*Cash Toward Accrual*) dalam hal pencatatan aset tetap tidak lagi ada pembentukan dana depresiasi (Hammam, 2017).

Standar akuntansi pemerintahan ini mengatur tentang penyusutan yang dapat dilakukan terhadap aset tetap, kecuali aset tetap tanah dan konstruksi dalam pengerjaan (Pujanira & Taman, 2017). Peraturan ini tidak menegaskan adanya kewajiban pemerintah untuk melakukan penyusutan atas aset tetap miliknya. Pada saat menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis *cash towards accrual* pemerintah sudah menerapkan penyusutan atas aset tetap dengan menyajikan dalam laporan keuangan sebesar nilai buku, yaitu nilai perolehan aset tetap ditambah dengan kapitalisasi atas aset tersebut dikurangi penyusutan (Puspitarini *et al.*, 2017). Dalam hal pengeluaran atas aset, yaitu pemakaian persediaan dan pemeliharaan belum diakui sebagai beban dalam laporan keuangan pemerintah. Peraturan ini kemudian disempurnakan kembali dengan terbitnya PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (*Akrual*) dan didukung dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada pemerintah daerah (Pratama, 2013; Rohman *et. al.*, 2018).

Terbitnya Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual ini berdampak signifikan terhadap pencatatan akuntansi aset tetap pemerintah (Rohman *et. al.*, 2019). Temuan BPK tahun 2016 menyajikan bahwa aset tetap pemerintah menjadi 30% dari kelemahan utama atas kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan yang berakibat tidak munculnya opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK (Hammam, 2017). Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual secara penuh inilah, pemerintah mulai memperhitungkan dan mencatat sebagai beban atas segala bentuk pengeluaran aset, termasuk nilai penyusutan dan amortisasi aset tak berwujud sudah diakui dan disajikan dalam laporan operasional. Penyajian dalam laporan operasional atas pos-pos pendapatan yang timbul atas suatu aset telah diakui dan disajikan secara memadai.

Penelitian terdahulu tentang penerapan akuntansi basis akrual banyak dilakukan pada persiapannya semata dan belum ada penelitian menyangkut aset daerah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Herwiyanti *et. al.* (2017) bahwa tingkat kesiapan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan mencapai 93,40% dalam menerapkan sistem akuntansi akrual, mulai dari aspek komunikasi, sumber daya, komitmen organisasi dan struktur birokrasi. Penelitian Satrio *et al* (2016) menunjukkan bahwa pimpinan dan jajaran SKPD Pemerintah Kabupaten Jombang memiliki komitmen dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual dengan dukungan sumber daya manusia, regulasi dan teknologi informasi. Sedangkan penelitian atas penerapan basis akrual atas penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) baru dilakukan oleh Puspitarini *et al* (2017) yang membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual pada penatausahaan Barang Milik Negara (BMN), sedangkan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual pada pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Penatausahaan barang milik daerah membutuhkan kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas untuk mewujudkan pengelolaan yang efektif dan efisien. Sumber daya manusia merupakan faktor penting penggerak suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Tentu saja kompetensi dalam hal ini meliputi kemampuan, keterampilan dan pengetahuan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan. Faktanya, tingkat pergantian pengurus barang di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sering terjadi, sehingga sulit diperoleh aparatur pengurus barang yang kompeten. Munaim (2012) dalam Sulistiawati (2016) menyatakan bahwa hambatan utama yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah bukan terletak pada regulasi yang ada, namun lebih pada pemahaman dan kepatuhan aparatur terhadap penerapan regulasi tersebut.

Komitmen organisasi menjadi faktor penting dalam penerapan akuntansi berbasis akrual pada pengelolaan barang milik daerah. Hasil penelitian Safitri (2017) menunjukkan bahwa komitmen organisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Temuan Kristiawati (2015) juga menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan faktor yang paling berperan dalam keberhasilan pelaksanaan akuntansi akrual di Pemerintah Kalimantan Barat. Komitmen organisasi merujuk pada tuntutan sikap internalisasi aparatur pemerintah daerah sebagai bagian dari organisasi dan sikap loyal untuk terus berada dalam lingkup organisasi tersebut. Tentu saja juga dibutuhkan adanya keselarasan komitmen individu dengan komitmen organisasi untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan dalam PP nomor 71 tahun 2010.

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik meneliti kembali penelitian Puspitarini *et al* (2017) dengan menggunakan variabel efektivitas penerapan akuntansi basis akrual atas pengaruhnya terhadap barang milik daerah. Adapun komponen penting yang mendasari terwujudnya basis akrual atas barang milik daerah adalah aspek kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, teknologi informasi dan intensitas *stock opname*. Penelitian yang dilakukan Puspitarini *et al* (2017) menggunakan variabel kompetensi sumber daya manusia dan teknologi informasi dalam kaitannya penerapan akuntansi basis akrual pada pengelolaan barang milik negara.

Hasil penelitian atas variabel teknologi informasi menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Puspitarini *et al* (2017), Rosiana *et al* (2016) dan Iznillah (2015) menyatakan teknologi dan sistem informasi tidak berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi akrual. Penelitian Sulistiawati (2017) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh tidak signifikan terhadap pengelolaan barang milik daerah. Berkenaan hal tersebut, peneliti tertarik menguji kembali variabel teknologi dan informasi serta komitmen organisasi sebagai variabel

yang mempengaruhi efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah.

Teknologi informasi merupakan perangkat pendukung yang penting dalam proses penatausahaan aset daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan. Proses penatausahaan dan penyajian barang milik daerah dapat dilakukan dengan mudah dan tepat waktu. Dengan sistem informasi yang memadai, pemerintah daerah dapat memperoleh data, menyusun dan menyajikan laporan barang milik daerah secara andal dan beban kerja dapat dikerjakan secara efektif dan efisien.

Temuan BPK atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah banyak menyorot masalah persediaan sebagai bagian dari neraca yang memiliki nilai material, sehingga mempengaruhi opini yang dikeluarkan. Nilai persediaan yang disajikan di neraca haruslah mendekati nilai riil sesuai catatan kondisi di gudang. Proses *stock opname* merupakan bagian dari sistem pengendalian internal Pemerintah Kota Surabaya. Adanya intensitas *stock opname* akan berpengaruh terhadap peningkatan efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah.

Dari uraian di atas maka tujuan dari penelitian ini ialah menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, teknologi dan sistem informasi, dan intensitas *stock opname* terhadap efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Implementasi Kebijakan Publik (Teori Edward III)

Model implementasi kebijakan publik menggunakan Teori Edward III (Anggara, 2018) bahwa konsep yang dibahas dalam teori ini jauh lebih dalam dan operasional. Implementasi merupakan tahapan proses kebijaksanaan yang berada di antara tahap penyusunan kebijaksanaan dan hasil yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan (*output, outcome*).

Aji (2014) mengutip teori Edwards III implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: (1) Komunikasi, keberhasilan implementasi jika pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi; (2) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi pelaksana dan sumber daya finansial; (3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila pelaksana memiliki disposisi yang baik, maka pelaksana tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika pelaksana memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif; (4) Struktur Birokrasi, struktur organisasi yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure (SOP)* dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Akrual atas Barang Milik Daerah

Sumber daya manusia merupakan unsur terpenting dalam proses pergerakan organisasi karena kontribusi utama dari sumber daya manusia dapat menghasilkan *output* yang dicitakan organisasi. Pemerintah daerah dituntut untuk memberikan pelaporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu upaya penyusunan pelaporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan adalah melalui penatausahaan barang milik daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan akrual. Penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah tentu tergantung pada kompetensi sumber daya manusia yang menggerakkan organisasi tersebut. Sumber daya manusia merupakan pelaku utama dalam penerapan standar akuntansi akrual tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Syarif (2009) bahwa sumber daya manusia merupakan salah faktor penting dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.

Sumber daya manusia merupakan ujung tombak dan penggerak roda organisasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan pembuatan laporan keuangan dan ketidaksesuaian dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Putri, 2012).

Penelitian yang mendukung bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dilakukan juga oleh Sudaryati & Heriningsih (2014); Putra & Dodik (2015); Safitri (2017); Kristiawati (2015); Iznillah *et al* (2015); Rosiana *et al* (2016); Satrio (2016); dan Gaffar *et al* (2017). Hal ini membuktikan bahwa sumber daya manusia memegang peranan penting dalam efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual pada sektor pemerintahan. Penggunaan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual atas barang milik daerah membutuhkan kompetensi sumber daya manusia yang baik, melalui pemahaman atas standar akuntansi pemerintahan dan peraturan perundangan lainnya kepada pengurus barang pengguna dan pejabat penatausahaan keuangan (PPK) melalui strategi pelatihan. Kompetensi sumber daya manusia tersebut dibutuhkan untuk menghindari kesalahan dalam penyajian laporan barang milik daerah dan laporan keuangan daerah yang nantinya dapat menentukan kualitas informasi yang dihasilkan oleh pemerintah daerah kepada publik. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah.

Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Akrual atas Barang Milik Daerah

Tujuan organisasi dapat diwujudkan oleh anggota organisasi jika ada komitmen yang kuat untuk mencapainya. Efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah bisa diwujudkan jika ada komitmen kuat aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam proses pencatatan dan penatausahaan barang milik daerah.

Menurut Robbins (2002) dalam Safitri (2017) komitmen organisasi adalah keadaan dimana karyawan memihak pada organisasi tersebut dan tujuannya, serta berniat untuk memelihara keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Pada pemerintah daerah, aparat yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan menggunakan informasi yang dimiliki. Kejelasan sasaran pengelolaan barang milik daerah akan mempermudah aparat pemerintah daerah dalam menatausahakan pengelolaan barang milik daerah dengan menerapkan basis

akrual. Tingginya komitmen aparat pemerintah daerah akan berimplikasi pada komitmen untuk menerapkan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah.

Penelitian Iznillah *et al* (2015) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan hal ini sejalan dengan pandangan Azman (2015), Putra & Dodik (2015) serta Jantong (2017). Berdasarkan hal tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₂ : Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah.

Pengaruh Teknologi dan Sistem Informasi terhadap Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Akrual atas Barang Milik Daerah

Teknologi dan sistem informasi merupakan perangkat pendukung yang penting dalam upaya penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah. Hal ini dikarenakan basis akrual memerlukan perangkat lunak (*software*) yang mendukung pencatatan *double entry* untuk kesuksesan penerapan standar akuntansi pemerintah akrual secara penuh (Sudaryati & Heriningsih, 2014). Aplikasi dan program dibuat untuk mempermudah proses pencatatan dan penatausahaan barang milik daerah sesuai standar akuntansi akrual.

Teknologi dan sistem informasi adalah kombinasi antara teknologi informasi dan interaksi pengguna teknologi informasi. Sistem informasi yang memadai dalam pelaksanaan standar akuntansi pemerintahan akrual meliputi ketersediaan komputer (*hardware*) dan program-program akuntansi pemerintahan (*software*) yang akan sangat membantu SKPD dalam melaksanakan tugasnya dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan. Pentingnya peran perangkat pendukung ini telah dibuktikan oleh Safitri (2017) dan Kristiawati (2015) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa perangkat pendukung sistem informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Penelitian Arlini *et al* (2014) menunjukkan bahwa sistem informasi mendukung manajemen aset. Teknologi dan sistem informasi membantu entitas dalam menyajikan informasi akuntansi termasuk penyajian barang milik daerah yang andal. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₃ : Teknologi dan sistem informasi berpengaruh positif terhadap efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah.

Pengaruh Intensitas *Stock Opname* terhadap Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Akrual atas Barang Milik Daerah

Prosedur *stock opname* atas barang milik daerah dilakukan secara berkala. Aktivitas ini untuk melaksanakan aspek sistem pengendalian internal entitas dan memastikan keakuratan informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan. Tentu saja peran intensitas *stock opname* ini akan mendukung efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah. Informasi yang disajikan akan memuat informasi yang andal. Metode pencatatan persediaan mengikuti PSAP 05, yaitu periodik atau perpetual. Metode pencatatan tersebut dapat dilakukan secara andal melalui mekanisme *stock opname* guna memastikan kesesuaian catatan persediaan dengan perhitungan fisik gudang.

Pengurus barang pengguna di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban untuk melakukan *stock opname* barang persediaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 16 huruf (e). Mengacu pada peraturan tersebut prosedur intensitas *stock opname* dapat mendukung penyajian laporan barang persediaan sesuai dengan kondisi fisik di gudang atau instansi. Menurut sepengetahuan peneliti, penelitian atas variabel *stock opname* sangatlah

minim. Tulungen (2014) menyatakan bahwa faktor perencanaan Barang Milik Negara (BMN) yang terbentuk dari *stock opname* terhadap barang milik negara mempengaruhi pengelolaan manajemen aset di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini mengindikasikan bahwa *stock opname* berpengaruh terhadap manajemen aset barang milik negara. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₄ : Intensitas *stock opname* berpengaruh positif terhadap efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kausal untuk menguji secara empiris pengaruh satu atau lebih variabel bebas (variabel independen) terhadap variabel terikat (variabel dependen). Variabel independen dalam penelitian ini adalah kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, sistem dan teknologi informasi serta intensitas *stock opname*. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur yang terlibat dalam penatausahaan barang milik daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Surabaya. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan atau staf PPK serta Pengurus Barang Pengguna. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling* dengan pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan (*judgment sampling*). Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diberikan 2 (dua) set kuesioner yang diisi oleh responden yang menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan/atau staf PPK dan Pengurus Barang Pengguna. Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 144 responden yang berada dilingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan 72 (tujuh puluh dua) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Penyebaran kuesioner dilakukan pada 01 – 15 Februari 2019, sedangkan pengembalian kuesioner mulai 16 Februari – 01 Maret 2019.

Teknis Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi tahapan (1) Uji kualitas data terdiri atas uji validitas dengan ketentuan jika nilai r hitung lebih dari r tabel ($r_{hitung} > r_{tabel}$) maka butir-butir pernyataan tersebut valid dan uji reliabilitas dengan ketentuan dikatakan reliabel jika nilai *cronbach alpha* lebih dari 0,70 (Ghozali, 2016: 47-48). (2) Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogrov-Smirnov* pada tingkat signifikan 5%, uji multikolinieritas dengan cara melihat angka *collinearity Statistics* yang ditunjukkan oleh Nilai *Variance inflation Factor (VIF)*. Jika angka $VIF > 10$, maka variabel bebas memiliki masalah multikolinieritas dan nilai *tolerance* pada output penilaian multikolinieritas yang tidak menunjukkan nilai lebih besar dari 0,1 akan memberikan kenyataan tidak terjadi multikolinieritas. (3) Uji Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. (4) Uji kesesuaian model yang digunakan apakah model yang digunakan dalam penelitian ini telah sesuai atau tidak, yakni jika nilai F

lebih besar daripada 4 dan nilai signifikan kurang dari 5% (<5%), maka semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. (5) Uji statistika parameter individual atau uji t dengan ketentuan apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t-tabel ($T_{hitung} > T_{tabel}$), maka variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. (Ghozali, 2016). (6) Analisis regresi linier berganda, di mana dalam penelitian ini memiliki persamaan linier berganda seperti berikut ini:

$$SAP = a + b_1SDM + b_2TI + b_3KO + b_4SO + e \quad (1)$$

Dimana :

- SAP : penerapan SAP akrual BMD
- a : konstanta
- $b_{1,2,3,4}$: koefisien regresi
- SDM : kompetensi SDM
- TI : teknologi dan sistem informasi
- KO : komitmen organisasi
- SO : intensitas *stock opname*
- e : Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) dan tingkat pengembalian kuesioner sebesar 100% untuk dapat diolah. Distribusi kuesioner dan tingkat pengembaliannya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Kuesioner dan Tingkat Pengembaliannya

| Keterangan | Jumlah OPD | Responden | Kuesioner yang disebar | Kuesioner kembali | Kuesioner dapat diolah |
|----------------------|------------|------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| Sekretariat | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Inspektorat | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dinas Daerah | 21 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Badan | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Satuan Polisi Pamong | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kecamatan | 31 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Rumah Sakit | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| TOTAL | 72 | 144 | 144 | 144 | 144 |

Sumber: data diolah oleh Peneliti (2019)

Uji Kualitas Data

Berdasarkan hasil olahan data seluruh pernyataan dikatakan valid. Hal ini dikarenakan r tabel lebih besar dari r hitung. Dengan demikian variabel kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, teknologi dan sistem informasi, dan intensitas *stock opname* terhadap efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah memiliki nilai r hitung lebih dari 0,164 sehingga dinyatakan item pernyataan yang digunakan valid. Kemudian hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel reliabel karena nilai *cronbach alpha* lebih dari 0,70.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini meliputi (1) uji normalitas di mana nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yakni berjumlah 0,200, hal ini menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal dikarenakan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih dari 0,05, (2) uji multikolinieritas di mana disimpulkan variabel bebas dalam penelitian ini bebas dalam masalah multikolinieritas, hal ini dikarenakan nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,1.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, teknologi dan sistem informasi serta intensitas *stock opname* terhadap efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linier berganda untuk menjawab rumusan hipotesis. Adapun hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini dapat disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | .878 | .481 | | 1.827 | .070 |
| SDM | .355 | .110 | .263 | 3.232 | .002 |
| KO | .260 | .072 | .299 | 3.635 | .000 |
| TI | .134 | .103 | .118 | 1.304 | .194 |
| SO | .064 | .090 | .064 | .713 | .477 |

a. Dependent Variable: SAP

Sumber: data diolah oleh Peneliti (2019)

Berdasarkan tabel di atas, maka model persamaan regresi linier berganda berikut:

$$SAP = 0,878 + 0,355SDM + 0,260KO + 0,134TI + 0,064SO + E \quad (2)$$

Dimana:

- SAP : Efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah
- SDM : Kompetensi sumber daya manusia
- KO : Komitmen organisasi
- TI : Teknologi dan sistem informasi
- SO : Intensitas *stock opname*
- E : Error/Pengganggu

Berdasarkan persamaan di atas, dapat dilihat bahwa koefisien variabel kompetensi sumber daya manusia bernilai positif sebesar 0,355 dan koefisien variabel komitmen organisasi bernilai positif sebesar 0,260, yang berarti efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah meningkat dengan adanya kompetensi sumber daya manusia dan komitmen organisasi.

Uji Koefisiensi Determinasi Regresi (R^2)

Berdasarkan nilai *Adjusted R²* yakni sebesar 0,269, hal ini berarti sebanyak 26,9% variabel efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah

mampu dijelaskan oleh variabel kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, teknologi dan sistem informasi, dan intensitas *stock opname*. Sedangkan sisanya sebanyak 73,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikuti dalam penelitian ini.

Uji Kelayakan Model

Berdasarkan hasil statistika bahwa nilai F dalam penelitian ini sebesar 17,123 lebih dari 4 dan nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan layak untuk dilanjutkan.

Uji Hipotesis

Pengujian ini dilakukan untuk menilai sejauh mana pengaruh variabel kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, teknologi dan sistem informasi, dan intensitas *stock opname* terhadap variabel efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah. Hasil pengujian ini dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Rangkuman Hasil Pengujian Hipotesis

| Variabel | Nilai Signifikansi | Keputusan |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| Kompetensi sumber daya manusia | 0,002 | Hipotesis Diterima |
| Komitmen Organisasi | 0,000 | Hipotesis Diterima |
| Teknologi dan Sistem Informasi | 0,194 | Hipotesis Ditolak |
| Intensitas <i>Stock Opname</i> | 0,477 | Hipotesis Ditolak |

Sumber: data diolah oleh Peneliti (2019)

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat untuk variabel kompetensi sumber daya manusia nilai signifikansi 0,002 atau nilai signifikansi $< 0,05$, maka hipotesis pertama diterima. Hal ini bermakna bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah. Pengujian variabel komitmen organisasi menunjukkan hasil yang signifikan yakni 0,000 atau signifikansi $< 0,05$, maka hipotesis yang kedua diterima. Hal ini berarti komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah.

Hasil pengujian pada tabel 3 untuk variabel teknologi dan sistem informasi menunjukkan nilai signifikansi 0,194 atau $> 0,05$, sehingga dapat dijelaskan bahwa hipotesis ketiga ditolak. Hal ini berarti teknologi dan sistem informasi tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah. Berdasarkan tabel 3 untuk variabel intensitas *stock opname* menunjukkan nilai signifikansi 0,477 atau signifikansi $> 0,05$, maka hipotesis keempat ditolak. Hal ini berarti intensitas *stock opname* tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Akrual atas Barang Milik Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah. Adanya sumber daya manusia yang berkompeten merupakan unsur terpenting dalam proses pergerakan organisasi karena kontribusi utama dari sumber daya manusia dapat menghasilkan *output* yang dicita-citakan organisasi. Organisasi merupakan suatu kumpulan manusia yang bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, sehingga tujuan yang dicapai suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas pegawai yang ada dalam organisasi tersebut (Juliadi, 2016). Semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia sebagai

aparatur pengelolaan barang milik daerah, maka dapat dipastikan semakin efektif penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah.

Pemerintah daerah dituntut untuk memberikan pelaporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu upaya penyusunan pelaporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan adalah melalui penatausahaan barang milik daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan akrual. Penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah tentu tergantung pada kompetensi sumber daya manusia yang menggerakkan organisasi tersebut. Sumber daya manusia merupakan pelaku utama dalam penerapan standar akuntansi akrual tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Syarif (2009) bahwa sumber daya manusia merupakan salah faktor penting dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu di antaranya Sudaryati & Heriningsih (2014); Putra & Dodik (2015); Safitri (2017); Kristiawati (2015); Iznillah *et al* (2015); Rosiana *et al* (2016); Satrio *et.al.*(2016) dan Gaffar *et al* (2017) bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Hasil penelitian Jualiadi (2016) dan Arlini *et al* (2014) menunjukkan kualitas sumber daya manusia aparatur daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas manajemen aset tetap pemerintah daerah. Hal ini membuktikan bahwa sumber daya manusia memegang peranan penting dalam efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual pada sektor pemerintahan. Tentu saja dalam hal ini meliputi pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah. Penggunaan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual atas barang milik daerah membutuhkan kompetensi sumber daya manusia yang baik, melalui pemahaman atas standar akuntansi pemerintahan dan peraturan perundangan lainnya kepada pengurus barang pengguna dan pejabat penatausahaan keuangan (PPK) melalui strategi pelatihan. Kompetensi sumber daya manusia tersebut dibutuhkan untuk menghindari kesalahan dalam penyajian laporan barang milik daerah dan laporan keuangan daerah yang nantinya dapat menentukan kualitas informasi yang dihasilkan oleh pemerintah daerah kepada publik.

Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Akrual atas Barang Milik Daerah

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah. Hal ini menegaskan bahwa aparatur daerah berkeinginan untuk bekerja keras dan memiliki hasrat untuk bertahan menjadi bagian dari organisasi serta berkomitmen untuk menjalankan visi dan misi organisasi agar tercapainya tujuan organisasi. Tujuan organisasi dapat diwujudkan oleh anggota organisasi jika ada komitmen yang kuat untuk mencapainya. Efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah bisa diwujudkan jika ada komitmen kuat aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam proses pencatatan dan penatausahaan barang milik daerah.

Iznillah *et al* (2015) menegaskan bahwa aparat yang memiliki komitmen organisasi tinggi akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk kejelasan sasaran anggaran yang akan mempermudah aparatur daerah mencapai target anggaran yang telah ditetapkan. Adanya komitmen yang tinggi dari aparatur daerah akan berimplikasi pada komitmen untuk bertanggung jawab terhadap penyusunan anggaran yang akhirnya akan mempengaruhi efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Iznillah *et al* (2015), Azman (2015), Putra & Dodik (2015) serta Jantong (2017), bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas

barang milik daerah. Aparatur daerah yang memiliki komitmen yang kuat akan bekerja dengan maksimal agar organisasi tempat mereka bekerja dapat mencapai keberhasilan. Jika aparatur daerah yang berkeyakinan, visi misi organisasi akan tercapai dengan sumbangsih mereka, situasi kerja yang bersinergi akan tercipta dan bisa meningkatkan efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah. Sehingga dengan adanya komitmen organisasi maka dapat dipastikan semakin efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah.

Pengaruh Teknologi dan Sistem Informasi Terhadap Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Akrual atas Barang Milik Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di mana teknologi dan sistem informasi tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah. Padahal pada umumnya adanya teknologi dan sistem informasi sebagai perangkat pendukung yang penting dalam upaya penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah. Hal ini dikarenakan basis akrual memerlukan perangkat lunak (*software*) yang mendukung pencatatan *double entry* untuk kesuksesan penerapan standar akuntansi pemerintah akrual secara penuh (Sudaryati & Heriningsih, 2014). Aplikasi dan program dibuat untuk mempermudah proses pencatatan dan penatausahaan barang milik daerah sesuai standar akuntansi akrual.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Safitri (2017) dan Kristiawati (2015) yang menyatakan bahwa perangkat pendukung sistem informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Penelitian Arlini *et al* (2014) menunjukkan bahwa sistem informasi mendukung manajemen aset. Penelitian yang dilakukan, Putra & Dodik (2015); Satrio *et. al.* (2016); Gaffar *et al* (2017) menggunakan teknologi dan sistem informasi dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. Teknologi dan sistem informasi membantu entitas dalam menyajikan informasi akuntansi termasuk penyajian barang milik daerah yang andal.

Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspitarini, *et al* (2017), di mana adanya teknologi dan sistem informasi tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah. Hasil jawaban kuesioner yang termuat dalam pernyataan kuesioner menunjukkan masih terdapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum mempunyai komputer/laptop yang cukup memadai dalam melaksanakan tugas mereka, serta belum stabilnya jaringan internet yang digunakan untuk pengiriman data dan informasi yang diperlukan. Hal ini juga disebabkan masih terdapat OPD dalam praktiknya ketika peralatan komputer/teknologi informasi rusak tidak diperbaiki atau diganti sesegera mungkin. Adapun proses pengadaan komputer/teknologi informasi baru, harus melalui proses perencanaan dan penganggaran pada tahun anggaran yang akan datang.

Bukti empiris di lapangan menunjukkan bahwa tidak berpengaruhnya teknologi dan sistem informasi disebabkan oleh jaringan internet yang tidak stabil yang dialami oleh beberapa OPD yang berlokasi di luar pusat Pemerintah Kota Surabaya. Di mana OPD tersebut memiliki jarak yang bervariasi, sehingga ketika melakukan penatausahaan barang milik daerah melalui software yang terhubung melalui jaringan internet cukup terhambat.

Tidak berpengaruhnya variabel teknologi dan sistem informasi terhadap efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah pada Pemerintah Kota Surabaya juga didasari dari penyediaan software yang masih terus dilakukan perbaikan dan peningkatan. Sistem pencatatan persediaan (*e-inventory*) baru diluncurkan pada tahun 2017 dan masih belum mampu mengakomodir kebutuhan pencatatan persediaan OPD yang ada. Kondisi ini memicu masing-masing OPD membuat aplikasi masing-masing dan belum ada

sinergisitas dengan sistem pencatatan persediaan yang dibuat terpusat oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dampak dari kondisi ini, setiap OPD harus melakukan kerja dua kali karena menggunakan sistem pencatatan persediaan yang berbeda.

Pengaruh Intensitas *stock opname* Terhadap Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Akrual atas Barang Milik Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis bahwa intensitas *stock opname* tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah. Pada umumnya prosedur *stock opname* atas barang milik daerah dilakukan secara berkala. Aktivitas ini untuk melaksanakan aspek sistem pengendalian internal entitas dan memastikan keakuratan informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan. Tentu saja peran intensitas *stock opname* ini akan mendukung efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah. Informasi yang disajikan akan memuat informasi yang andal. Hal ini seperti yang disampaikan penelitian terdahulu yakni Tulungen (2014) bahwa faktor perencanaan Barang Milik Negara (BMN) yang terbentuk dari *stock opname* terhadap barang milik negara mempengaruhi pengelolaan manajemen aset di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini mengindikasikan bahwa *stock opname* berpengaruh terhadap manajemen aset barang milik negara.

Tidak berpengaruhnya intensitas *stock opname* terhadap efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah mendukung penelitian Andiani *et al* (2017) dan Amaliah *et al.* (2019) penatausahaan dan inventarisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, di mana adanya kualitas laporan keuangan yang baik akan terbentuk jika standar-standar dalam penyusunan laporan keuangan telah dilakukan seperti halnya efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah. Tidak berpengaruhnya intensitas *stock opname* terhadap efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah di mana temuan empiris Amaliah *et al.* (2019) menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan barang yang kondisinya rusak berat namun tercatat berkondisi baik, aset yang tidak mempunyai nomor identitas, barang milik negara yang secara fisik ada namun belum tercatat. Temuan ini juga konsisten dengan Pangayow & Pratama (2016) yang menunjukkan bahwa penerapan inventarisasi aset tidak menjamin optimalisasi pengelolaan aset di sektor pemerintah daerah. Inventarisasi aset dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat dan lengkap dan temuan tersebut karena pemahaman yang kurang atas inventarisasi aset, sehingga pelaksanaannya tidak tertib dan tidak tertata baik. Penelitian Andiani *et al* (2017) menemukan bahwa inventarisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh Kantor Pusat dan Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta. Proses inventarisasi yang sudah terakomodir dalam proses pembukuan, apabila inventarisasi tidak dilakukan, kualitas laporan keuangan tetap baik, asal pembukuannya juga dilaksanakan dengan baik.

Hal ini selaras dengan jawaban responden dalam penelitian ini bahwa masih terdapat OPD yang belum melakukan *stock opname* secara berkala dan melakukan penyimpanan barang persediaan sesuai dengan jenisnya. Kondisi empiris di lapangan menunjukkan beberapa OPD tidak melakukan *stock opname* secara berkala, tidak ada pengklasifikasikan jenis persediaan di gudang, dan kurangnya internal kontrol dalam penatausahaan penerimaan dan pengeluaran barang.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian data, diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah. Temuan tersebut berarti semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia sebagai aparatur pengelolaan barang milik daerah pada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, maka semakin efektif penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah; (2) Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah. Temuan ini berarti bahwa dengan adanya komitmen organisasi pada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya maka semakin efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah; (3) Teknologi dan sistem informasi tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah. Temuan ini mengidentifikasi dengan adanya teknologi dan sistem informasi belum tentu dapat meningkatkan efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah. Hal ini disebabkan masih terdapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum mempunyai Komputer/laptop yang cukup memadai dalam melaksanakan tugas mereka dan tidak stabilnya jaringan internet yang digunakan untuk pengiriman data dan informasi yang diperlukan. Dalam praktiknya proses perbaikan dan penggantian komputer/teknologi informasi yang rusak kadang kala memakan waktu cukup lama. Adapun pengadaan baru harus menunggu persetujuan anggaran berikutnya. Sistem penatausahaan persediaan di masing-masing OPD belum memiliki sinergitas dengan aplikasi yang dibuat Pemerintah Kota Surabaya; (3) Intensitas *stock opname* tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah. Temuan ini mengidentifikasi dengan adanya intensitas *stock opname* belum tentu dapat meningkatkan efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah. Hal ini disebabkan masih terdapat OPD yang belum melakukan *stock opname* secara berkala dan tidak melakukan penyimpanan barang persediaan sesuai dengan jenisnya.

Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi peneliti selanjutnya yakni terlihat dari nilai *adjusted R2* yakni hanya 26,9% variabel efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah mampu dijelaskan oleh variabel kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, teknologi dan sistem informasi, dan intensitas *stock opname*, sehingga kurang mengeksplorasi faktor-faktor lainnya yang berpengaruh. Saran untuk peneliti selanjutnya menambahkan variabel lain yang mempengaruhi efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah seperti komunikasi, kepatuhan terhadap regulasi, gaya kepemimpinan, dan lain-lain

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, D. S. (2014). *Implementasi Kebijakan Jampersal di Kota Yogyakarta Tahun 2013*. Skripsi S1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Amaliah, T. H., Husain, S. P., & Selviyanti, N. (2019). Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Negara Dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Wawasan Dan Riset Akuntansi*, 6(2), 120–131. <https://doi.org/10.25157/jwr.v6i2.1907>.
- Andiani, N. J., Hapsari, D. W., & Muslih, M. (2017). Pengaruh Penatausahaan dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Terhadap

- Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada kantor pusat dan kantor wilayah direktorat jenderal kekayaan negara DKI Jakarta). *EProceedings of Management*, 4(3), 2796–2803.
- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik, Cetakan Kedua*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Aprila, N. (2013). Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Penatausahaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pengelolakeuangan Daerah. *Jurnal Fairness*, 3(3), 19–29.
- Arief, S., Jumadi, & Abdullah. (2016). Pengembangan Model Implementasi Kebijakan Program Penanganan Anak Jalanan Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Kota Makassar. *In Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(1), 423–436.
- Arlini, M., Darwanis, & Abdullah, S. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi, Regulasi, dan Kompensasi Terhadap Manajemen Aset (Studi Pada Satuan Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Indonesia). *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 3(4), 66–75.
- Azman, T. (2015). Analisis Komitmen Organisasi, Kesiapan Sumberdaya Manusia, Infrastruktur Serta Sistem Informasi Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua. *Jurnal Sorot*, 10(1), 131–142.
- Bastian, I. (2007). *Sistem Akuntansi Sektor Publik, Cetakan Kedua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Colquitt, J., Lepine, J., Wesson, M., & Gellatly, I. R. (2015). *Organizational Behavior: Improving Performance And Commitment In The Workplace (Vol. 375)*. New York, NY, USA: McGraw-Hill.
- Fahmi, I. (2016). *Perilaku Organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Febrianti, S. (2016). Analisis Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, 10(1), 151–171.
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. (2006). *Standar Akuntansi Pemerintahan: Telaah Kritis PP Nomor 24 tahun 2005 Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPF.
- Gaffar, I., Hasanuddin, B., & Kusumawati, A. (2017). Pengaruh Inventarisasi Aset, Sumber Daya Manusia Terhadap Optimalisasi Aset Dengan Sistem Informasi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Analisis*, 6(2), 164–172.
- Ghazali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multilavare dengan Program SPSS Edisi 7*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hammam, M. (2017). Perjalanan Akuntansi Aset Tetap pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 3(1), 21–31.
- Herwiyanti, E., Sukirman, S., & Aziz, F. S. (2017). Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 19(1), 13–23. <https://doi.org/10.9744/jak.19.1.13-23>.
- Iznillah, M. Iuthfi, Azlina, N., & Silfi, A. (2015). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. *Jurnal FEKON*, 2(2), 1–15.
- Jantong, A. (2017). Faktor Determinan Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. *Matra Pembaruan*, 1(2), 109–119.
- Juliadi, M. (2016). *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah, Sistem Informasi Manajemen Aset Tetap dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Efektivitas Manajemen Aset Tetap Pemerintah Kota Mataram*. Tesis S2 Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Mataram, Mataram.

- Kahar. (2017). *Penyusutan Aset Tetap Pemerintah dan Permasalahannya*. Di akses pada 12 November 2018, 16:07 dari <http://www.bpk.go.id/jateng/konten/1908/Penyusutan-Aset-Tetap-pemerintah-dan-permasalahannya>.
- KEMENTERIAN DALAM NEGERI. (2013). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri*.
- KEMENTERIAN DALAM NEGERI. (2013). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah*.
- KEMENTERIAN DALAM NEGERI. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Kristiawati, E. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah Kalimantan Barat. *Akuntabilitas*, 8(3), 171–190. <https://doi.org/10.15408/akt.v8i3.2771>.
- Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik, Cetakan Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2013). *Akuntansi Sektor Publik, Cetakan Kedua*. Yogyakarta: UII Press.
- Makruf, S. (2018). *Pengertian Stock Opname: Tujuan dan Periode*. Di akses pada 15 November 2018, 15:54 dari <http://www.akuntansilengkap.com>.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Nikijuluw, M., Tinangon, J., & Wokas, H. (2017). Analisis Implementasi PSAP No.07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada Balai Penyantunan Lanjut Usia “Senja Cerah.” *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(1), 42–47. <https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17135.2017>.
- Nordiawan, D. (2007). *Akuntansi Sektor Publik, Cetakan Keempat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Novanti, I. (2017). *Kebijakan Publik*. Di akses pada 14 Januari 2019, 14:11 dari <http://indahnovann.blogspot.com/2017/11/v-behaviorurldefaultvml.html>.
- Nugroho, L., & Kiranti, D. E. (2017). Pengaruh Motivasi Dan Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi Barang Milik Negara. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 2(1), 20–34. <https://doi.org/10.32897/sikap.v2i1.61>.
- Pratama, A. Analisis Implementasi Akuntansi Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)*, 2(3).
- Pratama, M. R., & Pangayow, B. (2016). Pengaruh Manajemen Aset terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 11(2), 33–51.
- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. *Jurnal Nominal*, 6(2), 14–28.
- Puspitarini, I., Firmansyah, A., & Handayani, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Teknologi Informasi Terhadap Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pengelolaan Barang Milik Negara. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 1(2), 141–149. <https://doi.org/10.30871/jama.v1i2.501>.
- Putra, I. W. G. Y. D., & Ariyanto, D. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(1), 14–32.

- Putri. (2012). *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Pengendalian Intern terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan pada Pemda Kab. Bengkalis*. Thesis Dissertation. Univeristas Sriwijaya, Bengkalis.
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.
- Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Rohman, A., Daud, R., & Ubaidillah, U. (2018). Analisis Pengaruh Laporan Hasil Pemeriksaan, Diskresi Akrual Dan Tingkatan Akrual Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Profita : Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 11(3), 486–512. <https://doi.org/10.22441/profita.2018.v11.03.009>.
- Rohman, A., Daud, R., & Ubaidillah, U. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Profita : Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 12(1), 29–50. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.003>.
- Rosiana, E., Made, A., & Yogivaria, D. W. (2016). Pengaruh Kualitas SDM dan Teknologi Informasi terhadap Penerapan SAP Berbasis Akrual Pp N0 71 Tahun 2010 (Studi Kasus pada Skpd-skpd Pemerintah Kota Malang). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(2).
- Safitri, D. (2017). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Studi Pada Skpd Pemerintah Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 5(2), 174–189.
- Saputra, A. U. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Pengalaman dalam Mengelola Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dengan Etika Sebagai Variabel Moderating (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka). *Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Satrio, M. D., Yuhertiana, I., & Hamzah, A. (2016). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Kabupaten Jombang. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 18(1), 59–70. <https://doi.org/10.9744/jak.18.1.59-70>.
- Scott, W. R., & O'Brien, P. C. (2003). *Financial Accounting Theory (Vol. 3)*. Toronto: Prentice Hall.
- Sekaran, U. (2006). *Research Methods for Business Fourth Edition Buku 1, Terjemahan oleh Kwan Men Yon: Jakarta*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudaryati, D., & Heriningsih, S. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Akuntansi Akrual Dengan Perangkat Pendukung Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Yogyakarta). *Optimum: Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 4(2), 181–186. <https://doi.org/10.12928/optimum.v4i2.7795>.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis, Cetakan ke Delapan Belas*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis, Edisi Ketiga*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiawati, E. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemerintah Kabupaten Langkat dengan Peranan Pimpinan sebagai Variabel Moderating. *Thesis Disertation Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, Medan*.
- Syarif, D. (2018). *Metode Penelitian*. Di akses pada 15 November 2018, 20:33 dari <http://theorymethod.blogspot.com>.
- Syarif, F. (2009). *Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Pada Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu*.

- Tulungen, E. E. W. (2014). Analisis Faktor-Faktor Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 2(3).
- Wahyuni, N. E. (2016). Analisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Dalam Perspektif Teori Institusional: Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4(1).
- Wibowo. (2017). *Manajemen Kinerja Edisi Kelima, Cetakan Kedua Belas*. Depok: Rajawali Pers.